



---

**KLIPING DIGITAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**

**15 – 16 Maret 2023**

---



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16 / 03 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b>  <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b>  <b>RESUME</b>	<p>Rabu, 15 March 2023</p> <p><a href="https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/15/203000221/wujudkan-konstruksi-berkelanjutan-basuki-harapkan-dukungan-produk-lokal">https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/15/203000221/wujudkan-konstruksi-berkelanjutan-basuki-harapkan-dukungan-produk-lokal</a></p> <p>Wujudkan Konstruksi Berkelanjutan, Basuki Harapkan Dukungan Produk Lokal</p> <p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mengurangi emisi karbon melalui penerapan konstruksi berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur hijau. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hal ini dapat disinergikan dengan sistem natural dan solusi energi. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, ada sederet tantangan penyediaan infrastruktur berkelanjutan. Terlebih kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian PUPR memiliki 70 persen gap (jarak) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, APBN hanya dapat membiayai 30 persen dari kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur dan pembangunan Kementerian PUPR.</p>	+
2	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b>  <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b>	<p>Rabu, 15 March 2023</p> <p><a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20230315/47/1637602/pupr-aturan-harga-rumah-subsidi-masih-tahap-harmonisasi-kemenkumham">https://ekonomi.bisnis.com/read/20230315/47/1637602/pupr-aturan-harga-rumah-subsidi-masih-tahap-harmonisasi-kemenkumham</a></p> <p>PUPR: Aturan Harga Rumah Subsidi Masih Tahap Harmonisasi Kemenkumham</p> <p>Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna</p>	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16 / 03 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

	<b>RESUME</b>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan progres penerbitan aturan harga rumah subsidi terbaru masih dalam tahap harmonisasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan sebelum aturan tersebut diundangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka perlu sinkronisasi dengan kementerian terkait. setelah PMK selesai diharmonisasi dan diundangkan, selanjutnya Kementerian PUPR akan segera menerbitkan Keputusan Menteri. Namun, Herry tidak dapat memastikan waktu diselesaikannya harmonisasi PMK tersebut.	
3	<b>TANGGAL</b>  <b>MEDIA</b>  <b>JUDUL</b>  <b>NARASUMBER</b>  <b>RESUME</b>	Rabu, 15 March 2023  <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20230315152227-4-421935/investasi-infrastruktur-jokowi-untuk-5-bumn-capai-rp85-t">https://www.cnbcindonesia.com/news/20230315152227-4-421935/investasi-infrastruktur-jokowi-untuk-5-bumn-capai-rp85-t</a>  Investasi Infrastruktur Jokowi untuk 5 BUMN Capai Rp85 T  Menteri Keuangan Sri Mulyani  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menggelontorkan dana sebesar Rp 176,3 triliun rupiah untuk belanja yang keluar dalam bentuk investasi. Sebanyak 48,5% dari total dana tersebut atau hampir separuhnya sebesar Rp 85,3 triliun digelontorkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Selain itu, untuk mengadakan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, APBN akan menyuntik dana sebesar Rp 1,53 triliun kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Kemudian, dana bergulir sebanyak Rp 19,48 triliun akan diberikan untuk investasi non permanen fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).	+
4	<b>TANGGAL</b>  <b>MEDIA</b>    <b>JUDUL</b>	Kamis, 16 Maret 2023  <a href="https://amp.kompas.com/properti/read/2023/03/16/070000521/pengembang-bisa-bernapas-lega-kenaikan-harga-rumah-subsidi-masuk-babak">https://amp.kompas.com/properti/read/2023/03/16/070000521/pengembang-bisa-bernapas-lega-kenaikan-harga-rumah-subsidi-masuk-babak</a>    Pengembang Bisa Bernapas Lega, Kenaikan Harga Rumah Subsidi Masuk Babak Baru	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

16 / 02 / 2023

| Analisis Pemberitaan Media Online

---

<b>NARASUMBER</b>	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna
<b>RESUME</b>	Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menuturkan, aturan terkait harga rumah subsidi telah masuk tahap harmonisasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jika harmonisasi dengan Kemenkumham selesai, maka tinggal dibuat perundang-undangan (UU). Setelah itu, Kementerian PUPR pun akan membuat Keputusan Menteri (Kepmen) terkait kenaikan harga rumah subsidi.



15 / 03 / 2023

Sumber: Kompas.com

---

## **Wujudkan Konstruksi Berkelanjutan, Basuki Harapkan Dukungan Produk Lokal**

Penulis: Suhaiela Bahfein  
Editor: Masya Famely Ruhlessin

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mengurangi emisi karbon melalui penerapan konstruksi berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur hijau.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hal ini dapat disinergikan dengan sistem natural dan solusi energi.

Menurutnya, implementasi konstruksi berkelanjutan harus didukung oleh rantai pasok sumber daya konstruksi dengan mengupayakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan.

Langkah konkret penggunaan material konstruksi untuk mendukung rantai pasok konstruksi hijau adalah dengan diterbitkannya Instruksi Menteri (Inmen) PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Semen Non-Ordinary Portland Cement pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR.

"Inmen tersebut menginstruksikan peningkatan penggunaan sesuai pekerjaan konstruksinya yang mengacu kepada spesifikasi masing-masing teknis bidang," ungkap Basuki yang pidatonya dibacakan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Jarot Widyoko di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Basuki menuturkan, penggunaan semen non-UPC dapat berkontribusi dalam penurunan emisi karbon serta meningkatkan akurasi spesifikasi material semen sesuai peruntukkan pekerjaan konstruksi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, ada sederet tantangan penyediaan infrastruktur berkelanjutan.

Terlebih kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian PUPR memiliki 70 persen gap (jarak) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Artinya, APBN hanya dapat membiayai 30 persen dari kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur dan pembangunan Kementerian PUPR.

Besar investasi yang dibutuhkan mencapai 143,6 miliar dollar AS atau setara Rp 2.058 triliun. Ini terdiri dari sumber daya air (SDA) sebesar Rp 577 triliun, perumahan Rp 780 triliun, permukiman Rp 128 triliun, serta jalan dan jembatan Rp 573 triliun.

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/15/203000221/wujudkan-konstruksi-berkelanjutan-basuki-harapkan-dukungan-produk-lokal>



15 / 03 / 2023

Sumber: bisnis.com

---

## **PUPR: Aturan Harga Rumah Subsidi Masih Tahap Harmonisasi Kemenkumham**

Author: Afiffah Rahmah Nurdifa

Editor: Kahfi

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan progres penerbitan aturan harga rumah subsidi terbaru masih dalam tahap harmonisasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan sebelum aturan tersebut diundangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka perlu sinkronisasi dengan kementerian terkait.

"Sudah harmonisasi di Kementerian Keuangan, lagi dibahas dengan Kemenkumham. Seharusnya cepat ya kan sudah bahas lama, ini harmonisasi juga sudah yang ke berapa. Artinya produk sudah jadi tinggal harmonisasi dengan pihak lain," kata Herry saat ditemui di Auditorium PUPR, Rabu (15/3/2023).

Dia menerangkan, setelah PMK selesai diharmonisasi dan diundangkan, selanjutnya Kementerian PUPR akan segera menerbitkan Keputusan Menteri. Namun, Herry tidak dapat memastikan waktu diselesaikannya harmonisasi PMK tersebut.

Dengan progres saat ini, Herry masih optimistis dalam waktu dekat aturan harga rumah subsidi akan diterbitkan. Dalam hal

ini, dia terus memberi arahan kepada jajarannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian lain.

Lebih lanjut, dia menuturkan, jika harga rumah subsidi disesuaikan nantinya maka akan memberikan dampak positif bagi pengembang. Sementara itu, bagi konsumen akan berpengaruh pada cicilan.

"Kami harapkan itu bisa mengurangi beban pengembang, tapi buat masyarakat tentu dengan harga tersebut akan berpengaruh ke cicilan," ujarnya.

Sebelumnya, asosiasi pengembang dan pemangku kebijakan telah menyepakati kenaikan harga rumah subsidi sebesar 5 persen akan terlaksana tahun ini. Rencana penerbitan PMK mulanya dijanjikan Februari 2023, namun hingga pertengahan Maret ini belum terdengar kabar.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal REI Hari Ganie mengatakan pihaknya pun belum menerima informasi kelanjutan kesepakatan tersebut. Namun, dia mendapat kabar bahwa aturan tersebut akan terbit dalam waktu dekat.

"Dari BKF katanya Minggu ini turun, tapi ya kita lihat dan tunggu saja," kata Hari kepada Bisnis.

Sebagai informasi, batasan harga rumah subsidi yang saat ini berlaku mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

15 / 03 / 2023

Sumber: bisnis.com

---

Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No. 242/KPTS/M/2020 pada Maret 2020.

Sementara, untuk dapat mengeluarkan keputusan harga rumah baru, Kementerian PUPR masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur besaran kenaikan harga rumah subsidi, khususnya terkait pembebasan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk diketahui, kesepakatan penyesuaian harga rumah subsidi ini telah diputuskan dalam pertemuan pada Januari 2023 antara

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI) dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, serta Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230315/47/1637602/pupr-aturan-harga-rumah-subsidi-masih-tahap-harmonisasi-kemenkumham>



15 / 03 / 2023

Sumber: cnbcindonesia.com

---

## **Investasi Infrastruktur Jokowi untuk 5 BUMN Capai Rp85 T**

Author: Anisa Sopiah

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menggelontorkan dana sebesar Rp 176,3 triliun rupiah untuk belanja yang keluar dalam bentuk investasi. Sebanyak 48,5% dari total dana tersebut atau hampir separuhnya sebesar Rp 85,3 triliun digelontorkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

"Pos APBN untuk investasi, ini sering kita sebutnya below the line, di dalam APBN 2023 ada Rp 176,3 triliun yg merupakan pembiayaan investasi, artinya ini belanja uang keluar tapi ini adalah bentuk investasi," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (14/3/2023).

"Mayoritas adalah untuk investasi di bidang infrastruktur dari Rp 176,3 triliun tersebut sebesar Rp 85,3 triliunnya atau sekitar 48,5% akan digunakan untuk mendukung klaster infrastruktur," lanjutnya.

Dana sebanyak Rp 85,3 triliun tersebut akan mengalir ke 5 tempat. Pertama, diberikan kepada PT Hutama Karya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 28,88 triliun. Kemudian, diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 10 triliun.

Selanjutnya, diberikan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) sebesar Rp 25,4 triliun. Menkeu mengatakan dana ini diberikan utamanya untuk melakukan

pembebasan lahan di beberapa proyek strategis nasional, salah satunya pada proyek pembangunan jalan tol.

"Ini terutama nanti untuk pembebasan lahan-lahan yang seperti saya sama Pak Bas (Menteri PUPR) melihat salah satu tol di daerah Joglo Semarang dalam hal ini ini adalah salah satu aktivitas LMAN adalah melakukan pembayaran untuk pembebasan tanah bagi proyek strategis nasional," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, untuk mengadakan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, APBN akan menyuntik dana sebesar Rp 1,53 triliun kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Kemudian, dana bergulir sebanyak Rp 19,48 triliun akan diberikan untuk investasi non permanen fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Sedangkan FLPP yang merupakan investasi yang sifatnya non permanen karena dia dananya bergulir, akan mendapat Rp 19,48 triliun, ini juga untuk membantu akses pembelian rumah bagi masyarakat yang berpendapatan rendah," jelasnya.

Adapun klaster lain yang akan disuntik dengan dana APBN yakni klaster pendidikan sebesar Rp 20 triliun, klaster perlindungan masyarakat sebesar Rp 4,3 triliun, klaster pangan dan lingkungan hidup sebesar Rp 4,8 triliun, klaster kerja sama internasional sebesar Rp 3,5 triliun, dan klaster lainnya sebesar Rp 58 triliun,





## **KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

15 / 03 / 2023



Sumber: cnbcindonesia.com

---

serta terdapat pembiayaan kewajiban penjaminan sebesar Rp 0,33 triliun.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230315152227-4-421935/investasi-infrastruktur-jokowi-untuk-5-bumh-capai-rp85-t>



16 / 03 / 2023

Sumber: Kompas.com

---

## **Pengembang Bisa Bernapas Lega, Kenaikan Harga Rumah Subsidi Masuk Babak Baru**

Penulis: Suhaiera Bahfein

Editor: Masya Famely Ruhlessin

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepastian akan penetapan kenaikan harga rumah subsidi kini telah menemui titik terang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menuturkan, aturan terkait harga rumah subsidi telah masuk tahap harmonisasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah (masuk tahap) harmonisasi di Kemenkeu (yang) sudah mulai membahas dengan Kumham (Kementerian Hukum dan HAM)," tegas Herry di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Menurut Herry, seharusnya proses tersebut terbilang cepat. Pasalnya, aturan terkait kenaikan harga rumah subsidi sudah menjadi pembahasan lama.

Dia juga meminta agar para pengembang rumah subsidi untuk sabar menunggu akan terbitnya beleid tersebut.

"Ya sabar lah," cetus Herry singkat.

Herry membeberkan mengapa harus dilakukan harmonisasi aturan harga rumah subsidi dengan Kemenkumham.

"Kan peraturan ini dibuat PMK namanya (Peraturan Menteri Keuangan). Nah, sebelum jadi, dalam peraturan itu harus harmonisasi dengan Kemenkumham. Artinya, si produk sudah jadi nih tinggal diharmonisasi aja dengan pihak-pihak lain," jelas Herry.

Jika harmonisasi dengan Kemenkumham selesai, maka tinggal dibuat perundang-undangan (UU). Setelah itu, Kementerian PUPR pun akan membuat Keputusan Menteri (Kepmen) terkait kenaikan harga rumah subsidi.

Herry optimis bahwa aturan tersebut bisa selesai di bulan Maret 2023. Namun, dia tak dapat memastikan di instansi lainnya.

Ditambahkan dampak dari kenaikan harga rumah subsidi nantinya diharapkan dapat mengurangi beban pengembang.

Sedangkan bagi masyarakat, hal itu akan berpengaruh pada angsuran atau cicilan yang dibayarkan.

<https://amp.kompas.com/properti/read/2023/03/16/070000521/pengembang-bisa-bernapas-lega-kenaikan-harga-rumah-subsidi-masuk-babak>